



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI BUDIARTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 619768

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 963.538.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 429 m2/150 m2 di KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 963.538.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FD110 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 4D7 VEGAR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA ACH1M21B04 A/T (BEAT) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA D1BO2N13L2 A/T (BEAT) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.125.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.513.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.113.176.000

III. HUTANG Rp. 20.171.020**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.093.004.980



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.